

EKSISTENSI ETNIS TIONGHOA DI ERA GLOBALISASI

Alfa Khasanah

MAN 3 Bantul

Khasanahalfa118@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) untuk mengetahui sejarah masuknya etnis tionghoa di Indonesia karena etnis tionghoa sudah ada di Indonesia lama sekali. (2) untuk mengetahui populasi etnis tionghoa di Indonesia, tercatat sampai saat ini ada sekitar 1-2 % dari populasi penduduk Indonesia. (3) untuk mengetahui peran etnis tionghoa baik di sector social budaya, perokonomian, politik, maupun pendidikan. Hasil penelitian yang didapat: (1) Orang dari Tiongkok daratan telah ribuan tahun mengunjungi dan mendiami kepulauan Nusantara. Menurut catatan dalam kitab sejarah Tiongkok, pada zaman Dinasti Han (tahun 131 M), sudah ada hubungan resmi antara Dinasti Han di Tiongkok dengan Yavadwipa di Indonesia. Pada abad ke-7 kerajaan Tang mulai ada hubungan kebudayaan dan keagamaan Budha dengan kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-15 masa Dinasti Ming, seorang muslim Tiongkok Zhenghe memimpin barisan kapal telah 3 kali mendarat di kerajaan Majapahit untuk menjalin hubungan perdagangan dan kebudayaan. Sejak itu banyak orang keturunan Tionghoa mulai merantau dan menetap di Nusantara. (2) Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika untuk pertama kalinya responden sensus ditanyai mengenai asal etnis mereka, hanya 1% atau 1.739.000 jiwa yang mengaku sebagai Tionghoa. (3) Memasuki abad ke-20, ranah hiburan dan seni budaya di Tanah Air disemarakkan oleh kehadiran seniman atau pegiat seni keturunan Tionghoa. di bidang pendidikan etnis tionghoa berperan dalam pembangunan Universitas Trisakti yang kini menjadi salah satu universitas terkenal di Indonesia juga merupakan salah satu sumbangsih warga Tionghoa di Indonesia.

Kata Kunci: Tionghoa, Globalisasi

Abstract

The purpose of this article is: (1) to know the history of the entry of ethnic Chinese in Indonesia because ethnic Chinese have existed in Indonesia for a long time. (2) to know the ethnic Chinese population in Indonesia, there is currently about 1-2% of the population of Indonesia. (3) to know the role of ethnic Chinese in the social culture, smoking, politics, and education sectors. The results of the study obtained: (1) People from mainland China have visited and inhabited the archipelago for thousands of years. According to records in Chinese history, during the Han Dynasty (131 AD), there was already an official relationship between the Han Dynasty in China and Yavadwipa in Indonesia. In the 7th century, the Tang kingdom began to have a Buddhist cultural and religious relationship with the Srivijayan kingdom. In the 15th century during the Ming Dynasty, a Chinese Muslim Zhenghe led a line of ships having three times landed in Majapahit kingdom to establish trade and cultural relations. Since then many people of Chinese descent began to wander and settle in the archipelago. (2) In the population census in 2000, when for the first time census respondents were questioned about their ethnic origin, only 1% or 1,739,000 people claimed to be Chinese. (3) Entering the 20th century, the realm of entertainment and cultural arts in the country is enlivened by the presence of artists or art activists of Chinese descent. in the field of ethnic Chinese education plays a role in the development of Trisakti University which is now one of the famous universities in Indonesia is also one of the contributions of Chinese people in Indonesia.

Keywords: Chinese, Globalization

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai Tionghoa di Indonesia biasanya meliputi percaturan orang-orang Tionghoa dalam politik, sosial

dan budaya di Indonesia. Kebudayaan Tionghoa merupakan salah satu pembentuk dan bagian integral yang tak terpisahkan dari kebudayaan nasional

Indonesia sekarang ini. Kebudayaan Tionghoa di Indonesia walau berakar dari budaya leluhur, tetapi telah sangat bersifat lokal dan mengalami proses asimilasi dengan kebudayaan lokal lainnya.

Indonesia telah memasuki zaman demokrasi dan reformasi, politik, ekonomi dan sosial berpulih berangsur-angsur, kepercayaan umum dan dunia mulai pulih, ini suatu perubahan yang baik dan positif bagi Indonesia. Indonesia sedang maju dan berkembang, tetapi karena unsur-unsur yang rumit, ekonomi makro Indonesia diakui baik, tetapi ekonomi mikro masih belum membaik, penganggur dan orang miskin masih banyak, kesenjangan sosial sangat berat, Indonesia merupakan salah – satu negara yang kesenjangan soisialnya masih berat didunia. Dibawah hasutan oknum ekstrim dan politikus yang tidak bertanggungjawab, mudah timbul kerusuhan sosial, dan biasanya ujung tombaknya diarahkan terhadap etnis Tionghoa, mereka menjadi kambing hitam dalam kerusuhan. Sebetulnya etnis Tionghoa yang kaya tidak banyak, mayoritas lapisan sedang dan rakyat kecil, sepaerti di Tangerang dan Singkawang dan banyak tempat, etnis Tionghoa seperti penduduk lain hidup dan bekerja seperti rakyat kecil.

Perlu kita ketahui bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sudah eksis sebelum virus Corona menyerang. Orang-orang Tiongkok telah menghadapi persepsi “tidak higienis” dan “kotor” jauh sebelum SARS dan Covid-19 muncul. Pada awal Perang Opium abad ke-19, bangsa Tiongkok disebut sebagai “orang sakit di Asia Timur”. Ungkapan tersebut makin menjadi tatkala para migran bergerak ke Amerika Utara, mereka kerap dikaitkan dengan standar kebersihan yang buruk dan rentan terhadap penyakit (Simatupang, 2020). Adapun perlakuan tersebut dapat digolongkan sebagai xenophobia, yakni ketidaksukaan atau prasangka berlebih

terhadap orang-orang dari bangsa lain. Istilah “fobia” yang disematkan di dalamnya bukan berarti takut semata, melainkan cenderung diskriminasi yang bernuansa sosial-politik (DtichTheLabel, 2017). Kini, pandemi Covid-19 seolah-olah jadi pembenaran untuk mengekspresikan perilaku diskriminasi, bahkan membangkitkan kembali xenophobia ke tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan sosial kualitatif. Desain penelitian ini bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Dari aspek pengumpulan datanya mengadopsi teknik partisipatoris yang menyesuaikan fenomena dengan memilih analisis data. Partisipan yang ada dalam penelitian tidak diteliti secara langsung, melainkan berasal dari artikel-artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

UU RI No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Mendorong Etnis Tionghoa Lebih Lanjut Mengintegrasikan Diri Kedalam Masyarakat Arus Pokok Setempat.UU RI No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut menunjukkan di bumi Indonesia tidak ada lagi Pribumi dan non-Pribumi. “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” UU Kewarganegaraan Baru tersebut dapat sambutan hangat dari etnis Tionghoa.

Pemerintah Pusat dan Lokal Perlu Melaksanakan UU No.12 Kewarganegaraan RI 2006 dengan Baik, Menghapus Peraturan yang Tidak Sesuai Dengan UU tersebut. Indonesia mulai memasuki periode demokrasi dan reformasi, hukum belum

terlaksana dengan baik, masih menemui banyak kesukaran dalam menjalankan hukum. Misalnya sementara tempat dan pejabat masih tidak tegas melaksanakan UU No.12 Kewarganegaraan, etnis Tionghoa masih perlu menunjukkan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) waktu mengurus Surat Lahir, Surat Kawin, Surat Kartu Penduduk dsb. Karena itu, Kantor Imigasi, Kantor Urusan Sipil, Kantor Pendidikan dari Pemerintah perlu mengkoordinasi urusan tersebut dengan baik.

Pembahasan

Orang dari Tiongkok daratan telah ribuan tahun mengunjungi dan mendiami kepulauan Nusantara. Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah dulu di Nusantara untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Jawa ia berguru pada seseorang bernama Janabhadra.

Dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, para imigran Tiongkok pun mulai berdatangan, terutama untuk kepentingan perdagangan. Pada prasasti-prasasti dari Jawa orang Tionghoa disebut-sebut sebagai warga asing yang menetap di samping nama-nama sukubangsa dari Nusantara, daratan Asia Tenggara dan anak benua India. Dalam perjalanan sejarah pra kemerdekaan, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan, seperti pembantaian di Batavia 1740 dan pembantaian perang Jawa 1825-1830.

Pembantaian di Batavia melahirkan gerakan perlawanan dari etnis Tionghoa yang bergerak di beberapa kota di Jawa Tengah yang dibantu pula oleh etnis Jawa. Pada gilirannya ini mengakibatkan

pecahnya kerajaan Mataram. Orang Tionghoa tidak lagi diperbolehkan bermukim di sembarang tempat.

Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan permukiman etnis Tionghoa di sejumlah kota besar di Hindia Belanda. Pada Orde Lama, terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan, dll. Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu Tangan Kanan Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora. Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa dapat dikatakan sangat baik. Walau pada Orde Lama terdapat beberapa kebijakan politik yang diskriminatif seperti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibu kota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965 dan lainnya.

Selama Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang "masih dipertanyakan". Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa dilarang bereksresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh

komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin.

Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah *Harian Indonesia* yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. *Harian* ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air.

Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya. Pada masa akhir dari Orde Baru, terdapat peristiwa kerusuhan rasial yang merupakan peristiwa terkelam bagi masyarakat Indonesia terutama warga Tionghoa karena kerusuhan tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban bahkan banyak di antara mereka mengalami pelecehan seksual, penjarahan, kekerasan, dan lainnya.

Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia.

Walau belum 100% perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum hal tersebut di lakukan.

Di Medan, Sumatra Utara, misalnya, adalah hal yang biasa ketika warga Tionghoa menggunakan bahasa hokkien ataupun memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya. Selain itu, pada Pemilu 2004 lalu, kandidat presiden dan wakil presiden Megawati-Hasim Muzadi menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa.

Berdasarkan *Volkstelling* masa Hindia Belanda, populasi Tionghoa-Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%) dari penduduk Indonesia pada tahun 1930.^[3] Tidak ada data resmi mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia dikeluarkan pemerintah sejak Indonesia merdeka. Namun ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, dalam risetnya pernah memperkirakan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961.

Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika untuk pertama kalinya responden sensus ditanyai mengenai asal etnis mereka, hanya 1% atau 1.739.000 jiwa yang mengaku sebagai Tionghoa. Definisi "etnis" yang di BPS didasarkan atas pengakuan orang yang disensus. Atas dasar ini, jumlah ini dapat dianggap sebagai batas bawah ("lowerbound") karena banyak warga Tionghoa yang enggan mengaku sebagai "Tionghoa" dalam sensus. Perkiraan kasar yang dipercaya mengenai jumlah suku Tionghoa-Indonesia saat ini ialah berada di antara kisaran 4% - 5% dari seluruh jumlah populasi Indonesia.

Menurut Perpustakaan Universitas Ohio, jumlah suku Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbesar. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah etnis Tionghoa di Indonesia mencapai 7.670.000. Etnis Cina di Indonesia masuk dalam daftar 20 terbesar penduduk Indonesia. Berdasarkan data Sensus penduduk 2010, jumlah warga keturunan Tionghoa di Indonesia mencapai 2,83 juta jiwa atau sekitar 1,2 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 236,73 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut warga keturunan etnis Cina di Tanah Air berada di urutan 18 berdasarkan suku bangsa yang ada di Indonesia.

Tentang partisipasi kehidupan politik, kebanyakan etnis Tionghoa berpendapat perlu berpartisipasi dalam kehidupan politik pemerintah setempat, misalnya ada yang mendirikan partai politik etnis Tionghoa, ada yang masuk partai politik nasional, menjadi pegawai negara, menjadi tokoh profesional dsb. Partisipasi politik masyarakat Tionghoa kembali terlihat setelah lengsernya Soeharto pada 1998. Keterlibatan mereka saat itu terbagi dua: dalam politik formal dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun pemerintahan.

Saat itu ada sekitar tiga partai yang dibentuk masyarakat Tionghoa, yakni Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI). Keikutsertaan masyarakat Tionghoa dalam kancah politik di Indonesia pun terus meningkat pada Pemilu 2009 dan 2014. Pada Pemilu 2014 tercatat 315 caleg berasal dari etnis Tionghoa. Jumlah ini naik dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya punya 213 caleg Tionghoa.

Sejumlah tokoh juga aktif di partai politik. Termasuk di antaranya, kata Herlijanto, pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono atau Oey Kian Kok yang sempat bergabung

dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 2008. Ia disebut sebagai salah satu pendiri partai amanat nasional atau PAN bersama Amien Rais.

Peran politik masyarakat Tionghoa terus menanjak setelah itu, bahkan menjadi kepala daerah. Salah satunya Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, yang menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI pada 2014. Kehadiran Ahok dianggap memberikan pandangan baru bahwa etnis Tionghoa mampu memimpin masyarakat meski menjadi minoritas.

Apalagi Ahok saat itu juga dikenal dengan sejumlah kebijakan baru yang belum pernah diambil pemimpin dari kelompok mayoritas. Para pemilih pun seolah tak 'terusik' dengan keberadaan Ahok yang berlatar belakang etnis China. Serangan pada Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012. Meski demikian, ia tak menampik bahwa kondisi politik nasional masih dominan menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan. Tak heran jika pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, Ahok yang pernah menjadi mantan Bupati Belitung Timur kemudian tersandung masalah penodaan agama hingga memicu kehebohan di tataran politik nasional. Ia kemudian dipenjara selama dua tahun.

Kedua, bidang social dan budaya, Etnis Tionghoa belajar dan menguasai bahasa Indonesia, juga menghargai bahasa Tionghoa. Ini menunjukkan etnis Tionghoa mengintegrasikan diri kedalam masyarakat Indonesia, juga ingin mempertahankan adat dan budaya tradisionil sendiri. Jajak pendapat menunjukkan, etnis Tionghoa 100% dapat berbahasa Indonesia. Pemuda-pemudi dan setengah baya etnis Tionghoa berpendapat bahasa Indonesia merupakan "mother tongue" (bahasa ibu). Dalam pekerjaan, pergaulan dan kegiatan sehari-

hari, bahasa Indonesia merupakan bahasa paling penting.

Memasuki abad ke-20, ranah hiburan dan seni budaya di Tanah Air disemarakkan oleh kehadiran seniman atau pegiat seni keturunan Tionghoa. Nama-nama seniman lain keturunan Tionghoa yang juga tak luput dari pengamatan Didi, seperti komika Ernest Prakasa, musisi Aminoto Kosin, Bubi Chen dan Maya Hasan, juga pencipta lagu tradisional Makassar *Ati Raja*, Ho Eng Djie. seniman Tionghoa juga berprestasi di level internasional. Salah satunya, FX Harsono. Pada Desember 2014, seniman visual asal Jawa Timur ini menjadi salah satu pemenang Prince Claus Award. nama FX Harsono disanding dengan seniman mancanegara, dari penari sampai sineas asal Vietnam, India, Peru, Turki, Chili, Guatemala, Brasil, dan Filipina. Di ranah seni budaya, menurut Didi, orang Tionghoa di Solo, Jawa Tengah, memiliki peran besar dalam menggagas tontonan rakyat dengan menyajikan wayang orang.

Memasuki era Reformasi, diakui Didi, kaum Tionghoa di Indonesia jadi lebih berani dan terbuka dengan identitasnya. Tak lagi malu-malu, apalagi takut. Seperti pemain harpa Maya Hasan yang terang-terangan soal ayahnya, Mohamad Hasan, keturunan China. Ketiga, Ekonomi etnis Tionghoa merupakan komponen penting dari ekonomi bangsa nasional, data menunjukkan, mereka tidak menguasai ekonomi Indonesia. Ekonomi etnis Tionghoa mempunyai keunggulan dalam bidang modal, teknik, perlengkapan, pasaran dalam dan luar negeri serta pengalaman manajemen, dalam pembangunan ekonomi nasional mereka telah memberi sumbangan yang penting; Perusahaan etnis Tionghoa berkembang dari pedagang tradisional ke usaha industri terutama dalam usaha industri manufaktur dan usaha service, ekonomi etnis Tionghoa dalam globalisasi

ekonomi memainkan peranan positif Perusahaan etnis Tionghoa 95% keatas merupakan perusahaan sedang dan kecil, mereka dalam pemulihan ekonomi nasional setelah krismon memberi sumbangan yang penting.

KESIMPULAN

Etnis Tionghoa di Indonesia tidak hanya menghadapi gelombang diskriminasi mereka juga dihadapkan pada sejarah buruk yang menyimpannya saat Orde baru berkuasa. Bahkan hingga saat ini diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masih sering terjadi di akar rumput walaupun dalam skala kecil. Saat ini maupun untuk kedepannya, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah wajib menghentikan segala bentuk prasangka, cap buruk, maupun diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Seluruh pihak perlu memelihara kerukunan, kebersamaan, dan menjaga persaudaraan universal antar manusia. Kita perlu ingat bahwa Indonesia dibangun tidak hanya untuk beberapa etnis saja, melainkan untuk semua etnis yang ada di seluruh penjuru Nusantara, termasuk Tionghoa sebagai bagian integral bangsa ini karena mereka telah berkontribusi positif bagi perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu saja etnis tionghoa juga berperan dalam sektor pembangunan ekonomi Indonesia, etnis tionghoa juga berperan penting dalam dunia politik Indonesia sebagai contoh adalah Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, yang menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI pada 2014. kehadiran Ahok dianggap memberikan pandangan baru bahwa etnis Tionghoa mampu memimpin masyarakat meski menjadi minoritas. Serta nama-nama seperti komika Ernest Prakasa, musisi Aminoto Kosin, Bubi Chen dan Maya Hasan, juga pencipta lagu tradisional Makassar *Ati*

Raja, Ho Eng Djie. seniman Tionghoa juga berprestasi di level internasional. Salah satunya, FX Harsono. Pada Desember 2014, seniman visual asal Jawa Timur ini menjadi

salah satu pemenang Prince Claus Award Oleh karena itu, setiap warga negara, apapun etnisnya, memiliki hak yang sama dalam menjalani hidup.

DAFTAR PUSTAKA

KUMPARAN (2020, 25 Mei) gelombang diskriminasi etnis tionghoa

<https://kumparan.com/nabil-fiady/gelombang-diskriminasi-etnis-tionghoa-akibat-covid-19-indonesia-perlu-waspada-1tQ2bIgsD48/full>

Wikipedia (2020, 26 mei) tionghoa <https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa>

CNN Indonesia (2019, 5 februari) jatuh bangun etnis tionghoa dalam politik Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190205120557-32-366561/jatuh-bangun-etnis-tionghoa-dalam-politik-indonesia>

CNN Indonesia (2020, 16 februari) kontribusi besar etnis tionghoa di ranah hiburan
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150216161001-241-32533/kontribusi-besar-etnis-tionghoa-di-ranah-hiburan>

Data Publis (2017, 28 agustus) 1,2 persen penduduk Indonesia adalah etnis cina

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/28/283-persen-penduduk-indonesia-adalah-etnis-cina#:~:text=Etnis%20Cina%20di%20Indonesia%20masuk,berjumlah%2036%2C73%20juta%20jiwa.>